



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ETIKA PROFESI HAKIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Analisis Terhadap Kode Etik Profesi Hakim Indonesia)

TESIS

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam
pada Program Studi Perdata Islam
Konsentrasi Hukum Perdata Islam



Oleh :

FAZRUR RAHMAN
NIM. 505940005

**PROGRAM PASCASARJANA
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI
CIREBON
2011**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

DAPFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	
PERNYATAAN KEASLIAN	
LEMBAR PERSETUJUAN	
NOTA DINAS	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
KATA PENGANTAR	
PEDOMAN TRANSLITERASI	
DAPFTAR ISI	
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Kerangka Pemikiran	10
G. Metodologi Penelitian	16
H. Sistematika Pembahasan	17
BAB II :KODE ETIK PROFESI HAKIM INDONESIA	19
A. Gambaran Umum Peranan Hakim	19
1. Pengertian Peranan	19
2. Pengertian Hakim	26
3. Dasar dan Syarat Pengangkatan Hakim	28
4. Tanggung Jawab Hakim	37
B. Kode Etik Profesi Hakim Indonesia	42
1. Pengertian Kode Etik.....	42
2. Rincian Kode Etik Profesi Hakim Indonesia	50
3. Nilai-Nilai dalam Kode Etik Profesi Hakim	57



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

BAB III : KODE ETIK PROFESI HAKIM DALAM ISLAM	68
A. Pengertian Etika Islam	68
B. Landasan Etika Profesi dalam Islam	70
C. Sistem Etika Islam dalam Penegakan Hukum	75
D. Prinsip-Prinsip Peradilan dalam Nilai Etika Islam	78
BAB IV : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP KODE ETIK PROFESI HAKIM INDONESIA	92
A. Etika Pertanggungjawaban Hakim terhadap Amal Manusia	92
B. Aplikasi Kode Etik Profesi Hakim Indonesia	99
1. Dalam Persidangan.	100
2. Hubungan Sesama Hakim dengan Pegawai	104
3. Tanggung Jawab Sosial Hakim terhadap Hukum.....	108
BAB V : PENUTUP	113
A. Kesimpulan	115
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ETIKA PROFESI HAKIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Analisis Terhadap Kode Etik Profesi Hakim Indonesia)

Disusun Oleh :

FAZRUR RAHMAN
NIM. 505940005

Telah disetujui pada Tanggal Juli 2011

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Imron Abdullah, M.Ag

Dr. Achmad Kholiq, M.Ag

PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI
CIREBON
2011



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

LEMBAR PENGESAHAN

ETIKA PROFESI HAKIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Analisis Terhadap Kode Etik Profesi Hakim Indonesia)

Disusun oleh:

FAZRUR RAHMAN
NIM. 505940005

Telah diujikan pada tanggal 25 Agustus 2011
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum Islam (M. HI)

Cirebon, 08 September 2011

Dewan Penguji

Ketua/Anggota,

Sekretaris/Anggota ,

Prof. Dr. H. Jamali Sahrodi, M.Ag

Dr. H. Ahmad Asmuni, MA

Pembimbing/Penguji,

Pembimbing/Penguji,

Prof. Dr. H. Imron Abdullah, M.Ag

Dr. Achmad Kholiq, M.Ag

Penguji Utama

Prof. Dr. H. Jamali Sahrodi, M.Ag

Direktur,

Prof. Dr. H. Jamali Sahrodi, M.Ag
Nip. 19680408 199404 1 003



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Prof. Dr. H. Imron Abdullah, M.Ag

Program Pascasarjana

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

NOTA DINAS

Lamp. : 5 eksemplar

Hal : Penyerahan Tesis

Kepada Yth;

Direktur Program Pascasarjana

Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

Di

CIREBON

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara Fazrur Rahman NIM. 505940004 yang berjudul: *“Etika Profesi Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis terhadap Etika Hakim Indonesia)”* telah dapat diujikan. Bersama ini, kami kirimkan naskahnya untuk segera dapat diujikan dalam sidang tesis Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Atas perhatian Saudara, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, Juli 2011

Pembimbing I,

Prof. Dr. H. Imron Abdullah, M.Ag



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Dr. Achmad Kholiq, M.Ag

Program Pascasarjana

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

NOTA DINAS

Lamp. : 5 eksemplar

Hal : Penyerahan Tesis

Kepada Yth;

Direktur Program Pascasarjana

Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

Di

CIREBON

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara Fazrur Rahman NIM. 505940004 yang berjudul:

“Etika Profesi Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis terhadap Etika Hakim Indonesia)” telah dapat diujikan. Bersama ini, kami kirimkan naskahnya untuk segera dapat diujikan dalam sidang tesis Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Atas perhatian Saudara, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, Juli 2011

Pembimbing II,

Dr. Achmad Kholiq, M.Ag



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

PERNYATAAN KEASLIAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FAZRUR RAHMAN**
NIM : 505940004
Program Studi : Hukum dan Peradilan Islam
Konsentrasi : Hukum Perdata Islam
Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati
Cirebon

Menyatakan bahwa TESIS berjudul: *“Etika Profesi Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis terhadap Etika Hakim Indonesia)”* secara keseluruhan adalah ASLI hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini dibuat dengan sejujurnya dan dengan penuh kesungguhan hati, disertai kesiapan untuk menanggung segala resiko yang mungkin diberikan, sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, Juli 2011

Yang membuat pernyataan,

FAZRUR RAHMAN



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

ABSTRAKSI

Fazrur Rahman: *“Etika Profesi Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis terhadap Etika Hakim Indonesia)”*

Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum (Legal Aparatus) yang sudah memiliki kode etik sebagai standar moral atau kaedah seperangkat hukum formal. Namun realitanya para kalangan profesi hukum belum menghayati dan melaksanakan kode etik profesi dalam melaksanakan profesinya sehari-hari, terlihat dengan banyaknya yang mengabaikan kode etik profesi, sehingga profesi ini tidak lepas mendapat penilaian negatif dari masyarakat. Khusus berkenaan dengan pemutusan perkara di pengadilan yang dirasa tidak memenuhi rasa keadilan dan kebenaran maka hakim yang kena, dan apabila memenuhi harapan masyarakat maka hakim yang mendapat sanjungan. terhadap profesi hakim merupakan bukti adanya penurunan kualitas hakim sangat wajar sehingga pergeseran pun terjadi dan sampai muncul istilah mafia Peradilan. Indikasi tersebut menunjukan hal yang sering dalam penegakkan standar profesi hukum di Indonesia. Kode etik tampaknya belum bisa dilaksanakan dan nilai-nilai yang terkandung belum bisa diaplikasikan oleh mengembannya sendiri.

Masalah ini adalah bagaimana kode etik hakim di Indonesia, bagaimana kode etik profesi hakim dalam Islam dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kode etik profesi hakim Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kode etik hakim di Indonesia, mengetahui kode etik profesi hakim dalam Islam dan mengetahui pandangan hukum Islam terhadap kode etik profesi hakim Indonesia.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif Bentuk penelitian ini adalah berupa kajian pustaka (*library research*). Kajian ini berusaha mengungkapkan etika profesi hakim dalam perspektif hukum Islam melalui sumber data yang relevan dengan kebutuhan, baik buku-buku teks, jurnal, atau majalah-majalah ilmiah dan hasil-hasil penelitian.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa Etika profesi hakim dan hukum adalah merupakan satu kesatuan yang secara inheren terdapat nilai-nilai etika Islam yang landasannya merupakan pemahaman dari al-Qur'an, sehingga pada dasarnya Kode etik profesi hakim sejalan dengan nilai-nilai dalam sistem etika Islam. Etika hukum Islam dibangun di atas empat nilai dasar yaitu *pertama*, kebenaran yaitu adanya konsep kebenaran menjadikan manusia percaya untuk berbuat baik karena taat akan hubungan makhluk dan khaliq. *kedua*, keadilan yaitu adanya menyamakan (*Equalizing*) dan kesamaan (*leveling*) hak dalam bidang hukum yang dibangun dengan konsep keadilan mutlak dan sempurna secara transendental antara hukum dan moralitas. *Ketiga*, kehendak bebas yaitu manusia walaupun dibatasi oleh norma-norma yang ada tetapi mempunyai kehendak bebas / kebebasan (*free Will*). *Keempat*, pertanggung jawaban yaitu sebagai tuntutan dari kehendak bebas yaitu adanya pertanggungjawaban sebagai batasan dari apa yang diperbuat manusia dan harus dipertanggungjawabkan baik didunia maupun diakhirat.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya serta limpahan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul: *“Etika Profesi Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis terhadap Etika Hakim Indonesia)”*. Shalawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Rasul junjungan alam Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam penulisan tesis ini penulis banyak mendapat dorongan, bimbingan dan bantuan dari semua pihak, baik berupa moril maupun materil. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang Tua dan segenap keluarga yang dengan kesabarannya menanti akhir studi.
2. Bapak Prof. DR. H. Maksum Mukhtar, M.Ag, Rektor IAIN Syekh Nurjati (Institut Agama Islam Negeri) Cirebon.
3. Bapak Prof. Dr. H. Jamali Sahrodi, M.Ag, Direktur Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
4. Bapak Dr. H. Attabik Lutfi, MA., Ketua Program Studi Hukum dan Peradilan Islam Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
5. Bapak Prof. Dr. H. Imron Abdullah, M.Ag, Dosen Pembimbing I.
6. Bapak Dr. H. Achmad Kholiq, MA., Dosen Pembimbing II.
7. Civitas Akademika Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

8. Kawan-kawanku seperjuangan di Perdais khususnya trio buaya (Pa Asep sebagai ketua, Samud sebagai sekretaris, dan Fazrur sebagai bendahara), Kang Zizi ciki-ciki, Jeng Ghofur, Pa kholiq, Syahidin kemplu, Kang Toha yang brilian pemikiran-pemikirannya, Gus Ibnu, Pa Rudin, Shina, dan teh Nelly. Kebersamaan kita di perdais merupakan kenangan indah yang tidak mungkin tergantikan oleh kenangan apapun.
9. Wa bil khusus untuk calon istriku yang selalu setia dan tidak henti-hentinya memberikan semangat kepada penulis walaupun penulis sendiri belum tahu siapa sebenarnya calon istri penulis yang sampai sekarang masih menjadi misteri besar dalam hidup penulis.
10. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis.

Penulis menyadari sepenuhnya, walau dengan segala daya dan upaya yang telah penulis ushakan semaksimal mungkin, namun segala kekurangan dan kekhilafan dalam penulisan tesis ini, penulis sangat berterimakasih dan terbuka untuk menerima saran dan kritik yang konstruktif guna penyempurnaan tesis ini.

Hanya doa yang dapat penulis panjatkan kehadiran Ilahi Robbi, semoga amal baik bapak/ibu/saudara/I yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amiin.

Cirebon, Juli 2011

Penulis,



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

=	a	=	f
=	b	=	q
=	ts	=	k
=	j	=	l
=	<u>h</u>	=	m
=	kh	=	n
=	d	=	w
=	dz	=	h
=	r	=	,
=	z	=	y
=	s		
=	sy		
=	sh		
=	dl		
=	th		
=	zh		
=	'		
=	gh		

Untuk Madd dan Diftong

â	=	a panjang
î	=	i panjang
û	=	u panjang
	=	aw
	=	ay



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumunkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

ABSTRACT

Fazrur Rahman: *"Professional Ethics in Perspective of Islamic Law Judge (Justice Studies Ethics Analysis of Indonesia)"*

Judge as one of law enforcement (Legal Apparatus) which already has a code of ethics as a moral standard or a set of formal legal. But the reality of the legal profession has not live up to and implement a code of professional ethics in carrying out daily, seen by many who ignore the code of ethics, so that the profession is not ieapas received negative assessments from the public. Specifically relating to the termination case in court that feels no sense of fairness and truth are subject to the judge, and if it meets the expectations of the community then the judge who gets praise. to the profession of judges is evidence that a decrease in the quality of judges is very reasonable that the shift had occurred and until the term mafia Courts. Indications are showing things that are often in the professional standards of law enforcement in Indonesia. Codes of ethics can not seem to have implemented and embodied the values can not be applied by mengembannya own.

This issue is how the code of ethics of judges in Indonesia, how the professional code of ethics of judges in the view of Islam and how Islamic law against the professional code of ethics of judges Indonesia.

The purpose of this study was to determine the code of ethics of judges in Indonesia, knowing the code of ethics of judges in knowing the views of Islam and Islamic law against the professional code of ethics of judges Indonesia.

The research was conducted using qualitative methods of research is a form of literature review (*library research*). This study tried to reveal the professional ethics of judges in the perspective of Islamic law through the data sources relevant to the needs of both text books, journals, or scientific magazines and research results.

The results of this study concluded, that the ethics of judges and the legal profession is one unit that is inherently there are ethical values of Islam which is the foundation of understanding of the Qur'an, so basically the Code of ethics of judges in line with the values in a system of ethics Islam. Islamic legal ethics is built on four basic values: *first*, the truth that is the concept of truth makes people trust to do good because obedient creature and Creator of the relationship. *The second*, namely the equating justice (*Equalizing*) and similarity (*leveling*) the right in the area of law built with the concept of absolute and perfect justice are transcendental between law and morality. *Third*, although human free will is constrained by the norms that exist but have the free will / freedom (*Free Will*). *Fourth*, the responsibility is as the demands of free will that is a liability as the limit of what is done and should be accounted for either man in the world and the Hereafter.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

دمية القاضي (العدل التحليل أخلاقيات

":

"(

(جهاز القانونية) التي لديها بالفعل مدونة لقواعد السلوك كمييار أخلاقي أو مجموعة من القانونية الرسمية . مهنة المحاماة لم ترقى إلى مستوى وتنفيذ مدونة لقواعد السلوك المهني في الاضطلاع اليومية التي ينظر اليها من قبل العديد من الذين يتجاهلون مدونة لقواعد السلوك ، بحيث لا يتم فصل مهنة من الجمهور تلقى تقييم سلبي .تتعلق على وجه التحديد في حالة إنهاء الخدمة في المحك يشعر أي معنى للعدالة والحقيقة تخضع للقاضي ، وإذا كان يلبي تطلعات المجتمع ثم القاضي الذي يحصل على الثناء .لمهنة القضاة هو دليل على أن الانخفاض في نوعية القضاة من المعقول جدا أن التحول قد حدث وحتى المحاكم المافيا الأجل .المؤشرات تظهر الأشياء التي غالبا ما تكون في المعايير المهنية لإنفاذ القانون في اندونيسيا . يمكن أن مدونات قواعد السلوك لا يبدو أن تنفذ وتجسد القيم لا يمكن أن تطبق من قبل . هذه المسألة هو كيف يمكن للمدونة لقواعد السلوك للقضاة في اندونيسيا ، وكيف رمز للأخلاق المهنية للقضاة في نظر الإسلام ، وكيف الشريعة الإسلامية ضد رمز للأخلاق المهنية للقضاة اندونيسيا .

وكان الغرض من هذه الدراسة لتحديد مدونة سلوك القضاة في اندونيسيا ، مع العلم رمز للأخلاقيات القضاة في معرفة وجهات نظر الإسلام والشريعة الإسلامية ضد رمز للأخلاق المهنية للقضاة اندونيسيا .

أجري البحث باستخدام طرق البحث النوعي هو شكل من أشكال الاستعراض الأدب مكتبة البحوث . حاولت هذه الدراسة للكشف عن الأخلاقيات المهنية للقضاة في وجهة نظر الشريعة الإسلامية من خلال مصادر البيانات ذات الصلة لتلبية احتياجات كل من الكتب، والمجلات، أو المجلات العلمية .

وخلصت نتائج هذه الدراسة، أن أخلاقيات القضاة والمحاماة وحدة واحدة التي هي بطبيعتها هناك قيم الأخلاقية للإسلام الذي هو الأساس في فهم القرآن ، وذلك أساسا لقانون أخلاقيات القضاة بما ينسجم مع القيم في منظومة الأخلاق الإسلام .بنيت الأخلاق الشرعية الإسلامية على أربع قيم أساسية هي : أولا، الحقيقة هذا هو مفهوم الحقيقة تجعل الناس يتقون في عمل الخير لأن طاعة المخلوق والخالق للعلاقة والثاني ، وهما العدالة مساواة (تحقيق المساواة) ، والتشابه) . بنيت مع مفهوم العدالة المطلقة والكمال ومتسام بين القانون والأخلاق، وثالثا، على الرغم من تقييد حرية الإرادة البشرية من خلال المعايير التي موجودة ولكن لديها الإرادة الحرة / الحرية الإرادة الحرة). رابعا، المسؤولية كما هو مطالب الإرادة الحرة التي ويتم ذلك من المسؤولية في الحد من ما وينبغي أن تستأثر إما رجل في الدنيا والآخرة .



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan profesi mengimplikasikan kepada tuntutan-tuntutan norma etik yang melandasi persoalan profesional.¹ Namun hal tersebut tidak bisa sempurna karena sifat profesi yang terbatas, khusus dan unggul, maka bukan tidak mungkin akan terjadi gejala-gejala penyalahgunaan terhadap profesi yang dimiliki. yang seharusnya dengan penguasaan dan penerapan disiplin ilmu hukum dapat diemban untuk menyelenggarakan dan menegakkan keadilan di masyarakat

Pada era reformasi sekarang ini yang disertai krisis multidimensi di segala bidang di antaranya dalam bidang hukum. timbul keprihatinan publik akan kritik tajam sehubungan dengan curut marutnya penegakan hukum di Indonesia, dengan adanya penurunan kualitas hakim dan pengabaian terhadap kode etik, serta tidak adanya konsistensi. arah dan orientasi dari penegak hukum itu sendiri. Hal ini menyebabkan tidak adanya ketidakpastian dan ketidakadilan hukum, Dan pihak yang sering disalahkan adalah aparat penegak hukum itu sendiri, yang terdiri dari Hakim, Jaksa, Pengacara dan Polisi.²

¹ Priyo Utomo, *Etika Dan Profesi*, cet. ke-1 (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 1.

² Semua masing-masing mempunyai tugas yang saling tergantung dan saling melengkapi seperti hakim, yang memutuskan perkara. Jaksa, duduk sebagai wakil dari kepentingan umum sebagai penuntut. Pengacara, sebagai wakil rakyat yang terkena tuduhan dan polisi yang melakukan pemeriksaan atau penyidikan yang akan dicantumkan dalam BAP sebelum pengadilan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hakim³ sebagai salah satu aparat penegak hukum (Legal Aparatus) yang sudah memiliki kode etik sebagai standar moral atau kaedah seperangkat hukum formal. Namun realitanya para kalangan profesi hukum belum menghayati dan melaksanakan kode etik profesi dalam melaksanakan profesinya sehari-hari, terlihat dengan banyaknya yang mengabaikan kode etik profesi, sehingga profesi ini tidak iepas mendapat penilaian negatif dari masyarakat. Khusus berkenaan dengan keputusan perkara di pengadilan yang dirasa tidak memenuhi rasa keadilan dan kebenaran maka hakimlah yang kena, dan apabila memenuhi harapan masyarakat maka hakimlah yang mendapat sanjungan. Dengan kata lain masyarakat memandang wajah peradilan sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh sikap atau perilaku hakim. Sebagai contoh atas adanya hakim yang melakukan Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) dan dibuktikan dengan data Transparansi Internasional (TI) dan Catatan Political Economi Risk Conculatanty Ltd. (PERC)⁴ yang membuktikan bahwa korupsi di lembaga peradilan sebagai urutan ketiga setelah lembaga kepolisian dan Bea Cukai dan urutan lima besar di dunia.⁵ Berdasarkan hasil penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW).⁶

Berbagai kasus gugatan publik terhadap profesi hakim merupakan bukti

³ Hakim adalah sebuah gelar yang mempunyai pengetahuan tentang masalah-masalah yang tinggi nilainya, Dalam literatur Islam istilah hakim sering disebut dan digunakan untuk filosof. lihat *Ensiklopedia Indonesia*, (Jakarta : Gramedia 1983), hlm. 1208.

⁴ Wasingatu Zakiyah, dkk, *Menyingkap Tabir mafia Peradilan*, cet. ke-1 (Jakarta: ICW, 2002), hlm. 9.

⁵ Berdasarkan laporan Transparansi Internasional (T I) yang setiap tahunnya menerbitkan hasil survei *Corruption Perseption Inde*k sejak tahun 1998 sampai sekarang. lihat Wasingatu Zakiyah dkk, *Menyingkap Tabir.*, hlm. 11.

⁶ Indonesia Corruption Watch (ICW), lahir pada tanggal 21 Juni 1998 di tengah-tengah gerakan reformasi yang menghendaki pemerintahan yang menghendaki pemerintahan bebas dari KKN, lihat Wasingatu Zakiyah dkk, *Menyikap Tabir.*, hlm. 245.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

bahwa adanya penurunan kualitas hakim sangat wajar sehingga pergeseran pun terjadi dan sampai muncul istilah mafia Peradilan.⁷

Indikasi tersebut menunjukan hal yang sering dalam penegakkan standar profesi hukum di Indonesia. Kode etik tampaknya belum bisa dilaksanakan dan nilai-nilai yang terkandung belum bisa diaplikasikan oleh pengembannya sendiri.

Dasar pemikiran diatas maka sewajarnya bila muncul harapan dan tuntutan terhadap pelaksanaan profesi baik ciri, semangat, maupun cara kerja yang didasarkan pada nilai moralitas *communis morales* (*common morality*), seperti nilai kemanusiaan (*humanity*) nilai keadilan (*Justice*) dan kepastian hukum (*gerechtigheid*). Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat mengarah kepada perilaku anggota profesi hakim, sehingga perlu adanya dan ditegaskan dalam bentuk yang kongkrit (Kode Etik),⁸ Sehingga dengan adanya nilai-nilai dalam kode etik tersebut, pelaksanaan professional akan dapat di minimalisir dari gejala-gejala penyalahgunaan keahlian dan keterampilan professional dalam masyarakat sebagai klien atau subyek pelayan, hal ini penting karena nilai-nilai tersebut tidak akan berguna bagi professional saja melainkan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.⁹

Peranannya yang sangat penting dan sebagai profesi terhormat (*Officium nobile*), atas kepribadiannya yang dimiliki. Hakim mempunyai tugas sebagaimana dalam undang-undang pokok kekuasaan kehakiman adalah Hakim wajib

⁷ Mafia peradilan adalah konspirasi-konspirasi di pengadilan untuk memenangkan salah satu pihak tertentu dan sebutan bagi pihak-pihak yang mengambil keuntungan pribadi dari sistem hukum yang ada di pengadilan.

⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 8.

⁹ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, : Norma-norma bagi Penegak Hukum* cet. ke-1 (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 31.

menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.¹⁰ Untuk itu hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat

Di sini terlihat jelas seorang hakim dalam menjalankan tugasnya selain di batasi nonna hukum atau norma kesusilaan yang berlaku umum juga harus patuh pada ketentuan etika profesi yang terdapat dalam kode etik profesi.

Kode etik sendiri merupakan penjabaran tingkah laku atau aturan hakim baik di dalam menjaikan tugas profesinya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran maupun pergaulan dalam masyarakat. yang harus dapat memberikan contoh dan suri tauladan dalam kepatuhan dan ketaatan kepada hukum, Islampun menjelaskan bahwa hakim adalah seorang yang diberi amanah untuk menegakkan keadilan dengan nama Tuhan atas sumpah yang telah diucapkan, dalam pandangan Islam adalah kalimat tauhid adalah amalan yang harus diwujudkan dalam bentuk satu kata dan satu perbuatan dengan niat *lillahi ta'ala*.¹¹

Sehingga pada setiap putusannya benar - benar mengandung keadilan dan kebenaran, Allah swt berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah

¹⁰ Undang – undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 28 ayat (1).

¹¹ Bismar Siregar, *Hukum Hakim Dan Keadilan Tuhan*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 18.



adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.(Q. S. An-Nissa: 58)¹²

Melalui profesi inilah hakim mempunyai posisi istimewa. Karena hakim kongkritisasi hukum dan keadilan yang bersifat abstrak, dan digambarkan bahwa hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan.¹³ Hakim satu-satunya penegak hukum yang berani mengatasnamakan Tuhan pada setiap putusannya.¹⁴ Setiap keputusan hakim benar-benar berorientasi kepada penegakan nilai-nilai kebenaran dan keadilan daripada sekedar mengejar kepastian hukum sebagaimana yang diharapkan dalam kode etik profesi hakim.

Kode Etik profesi hakim bukanlah merupakan sesuatu yang datang dari luar tetapi terwujud justru berasal diciptakan oleh anggota profesi sendiri, sehingga pengaturan sendiri *self regulation*. Kalau diciptakan dari luar instansi atau pemerintah, maka tidak akan dijiwai oleh nilai-nilai yang hidup di kalangan profesi.¹⁵ Kode etik merupakan kesesuaian sikap yang harus di junjung tinggi oleh hakim dengan jiwa-jiwa pancasila¹⁶ untuk menegakkan supremasi hukum adalah menegakkan etika, profesionalisme serta disiplin,¹⁷ Meskipun demikian kode etik profesi hakim sebagai standar moral belum memberikan dampak yang

¹² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003)

¹³ Al Wisnubroto, *Hakim Dan Peradilan Di Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1997), hlm. 65.

¹⁴ Pada setiap putusan hakim selalu diawali dengan kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

¹⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman R I, *Analisis Evaluasi Tentang Kode Etik Advokat dan Konsultan Hukum*, (Jakarta: 1997), hlm 18. Lihat K.Bertens, *Etika*, cet.ke-2 , (Jakarta: Gramamedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 148.

¹⁶ Kesesuaian sifat dan sikap yang harus dijunjung tinggi oleh hakim sebagaimana tercantum dalam sila, pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kedua : Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, dan kelima: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

¹⁷ Kompas, *Etika Profesi Kunci Pas Penegakan Hukum*, 29 Mei 2002.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

positif. sehingga kode etik yang sudah sekian lama perlu dikaji kembali untuk disesuaikan dengan perubahan kondisi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Komisi Hukum Nasional (KHN) yang menilai bahwa banyak para kalangan profesi hukum belum menghayati dan melaksanakan kode etik profesi dalam melaksanakan profesinya sehari-hari. Oleh karena itu perlu dibentuk standar kode etik profesi hukum yang akan menjadi pedoman untuk perilaku profesi. Sebagai cara untuk memulihkan kepercayaan terhadap lembaga peradilan khususnya hakim yang sedang kacau.¹⁸

Munculnya wacana pemikiran tentang kode etik profesi hakim ini yang akan menjadi penelitian yang dititik beratkan pada analisis nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik profesi hakim. Penelitian ini penyusun anggap penting karena didorong oleh realitas profesi hakim yang mengabaikan nilai-nilai moralitas. Untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan sebagai benteng terakhir keadilan yang merupakan cita-cita dan tujuan¹⁹ (Khususnya Profesi hakim). Melihat permasalahan di atas penyusun merasa tertarik untuk membahas kode etik profesi hakim²⁰ dan dikaitkan dengan nilai-nilai etika Islam. Masalah ini sangat menarik untuk dikaji karena etika Islam²¹ yang bersumber dari al-Qur'an yang pada hakekatnya merupakan dokumen Agama dan bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang bermoral.

¹⁸ K.Bertens, *Etika*, hlm. 279.

¹⁹ Takdir Ali Mukti dkk, *Membangun Moralitas Bangsa*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengamalan Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 1998), hlm. 64.

²⁰ Kode Kehormatan yang menjadi bahasan disini adalah kode etik hasil dari musyawarah nasional XIII IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia) pada tahun 2001.

²¹ Nilai-nilai etika Islam disini adalah nilai etika yang mempunyai korelasi dengan nilai-nilai



B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian tesis ini adalah etika profesi hakim dalam perspektif hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Kode Etik Profesi Hakim Indonesia).

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah tesis ini adalah ketidak jelasan etika profesi hakim dalam perspektif hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Kode Etik Profesi Hakim Indonesia).

2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah ini dibuat untuk memfokuskan masalah penelitian yang akan dikaji dalam tesis ini, sebagai berikut:

- a. Aspek teoritis, yaitu etika profesi hukum yang mencakup seirah aktivitas profesi dalam kehidupannya. Telaah pendekatan moral, penelitian ini hanya membahas hubungan etika dan profesi secara konsep umum yang menyatakan hubungan tersebut sangat erat karena merupakan jaminan pelayanan oleh profesi apapun.²² Menyatakan bahwa dalam menegakkan keadilan dan kebenaran hakim harus terbebas dari pengaruh baik dari luar

penegakkan hukum yang tidak hanya berbicara sebatas kesopanan saja melainkan pandangan hidup tentang baik atau buruk dan perintah atau larangan.

²² Rofiqoh, "Etika Menurut Fazlur Rahman", Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999), hlm. 82.



maupun dari dalam yaitu; faktor moralis dan mentalis dalam menjalankan profesinya.²³

- b. Aspek penegakan kode etik profesi baik secara individu maupun kelompok, Dengan kata lain pada aspek kedua inilah etika profesi hakim berada sebagaimana yang di tetapkan Dewan Kehormatan daiam aplikasinya di lapangan. secara khusus tentang kode etik hakim atau kode kehormatan yang terkandung dalam etika profesi hakim dalam tinjauan etika Islam, Maka dari itu penyusun akan membahas etika profesi hakim yang diantaranya kode etik profesi hakim atau kode kehormatan hakim sebagai bahau yang mendukung terhadap penyusunan ini.

3. Pertanyaan Penelitian

Tesis ini mengangkat permasalahan etika profesi hakim dalam persfektif hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Kode Etik Profesi Hakim Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui:

1. Bagaimana tinjauan umum tentang kode etik hakim di Indonesia?
2. Bagaimana kode etik profesi hakim dalam Islam?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kode etik profesi hakim Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mendeskripsikan tinjauan umum tentang kode etik hakim di

²³ Muhammad Rodlin, "Etika Profesi": Telaah Pendekatan Filsafat Moral, skripsi tidak di terbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998), hlm. 61



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Indonesia.

2. Untuk mendeskripsikan kode etik profesi hakim dalam Islam.
3. Untuk mendeskripsikan pandangan hukum Islam terhadap kode etik profesi hakim Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Secara akademik, hasil penelitian ini diharapkan menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya dalam etika profesi hakim (Kode Etik Hakim Indonesia) dan sebagai bahan studi awal untuk penelitian lebih lanjut.

Secara praktis akademik, hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi pengambil kebijakan khususnya hakim dalam praktek di lapangan baik berupa kerangka teori maupun praktek.

E. Tinjauan Pustaka

Telaah pustaka yang penyusun lakukan terdapat beberapa karya ilmiah baik berupa buku maupun skripsi yang membahas tentang kode etik atau etika profesi hukum. Dari telaah tersebut kami mengkatagorikan kedalam dua aspek yaitu: Pertama, aspek teoritis, yaitu etika profesi hukum yang mencakup seluruh aktivitas profesi dalam kehidupannya. Kedua, aspek penegakan kode etik profesi baik secara individu maupun kelompok. Dengan kata lain pada aspek kedua inilah etika profesi hakim berada sebagaimana yang di tetapkan Dewan Kehormatan dalam aplikasinya di lapangan.

Diantara karya yang termasuk ke dalam aspek teoritis adalah: Karya



Oemar Seno Aji dalam bukunya *Etika Professional dan Hukum: Profesi Advokat*, karya ini hanya menyoroti permasalahan etik dari profesi advokat, dokter dan wartawan.²⁴ Namun dalam karya ini disebutkan bahwa kode etik secara umum mengandung *normative ethich* dan adanya rahasia profesi yang menjadi asas yang memberikan hak untuk menolak keterangan sebagai saksi (*vershonings recht*).²⁵

Karya Suhrawardi K. Lubis, berjudul *Etika Profesi Hukum*, dalam karya ini mencoba membahas etika profesi hukum secara global yang meliputi penasehat hukum dan notaris, dan tidak membedakan antara penasehat hukum dengan advokat.²⁶

Kemudian karya E. Sumaryono yang berjudul *Etika Profesi Hukum: Norma-norma Bagi Penegak Hukum*, buku ini membahas etika profesi bagi para penegak hukum untuk meningkatkan profesionalitas kerja. Namun obyek pembahasannya hanya di fokuskan pada empat jenis profesi yaitu jaksa, advokat, notaris dan polisi dan tidak mengkaji masalah nilai-nilai etika hakim.²⁷

F. Kerangka Pemikiran

Teori etika adalah gambaran umum rasional mengenai hakekat dan dasar perbuatan dan keputusan yang benar serta prinsip-prinsip yang menentukan klaim

²⁴ Oemar Seno Adji, *Etika Profesional dan Hukum, Profesi Advokat*, cet I (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm. 41.

²⁵ Martias Gelar Imam Raharjo, *Pembahasan Hukum: Penjelasan Istilah-istilah Hukum Belanda-Indonesia*, cet I (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 218

²⁶ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, hlm. 28-37.

²⁷ E. Sumaryono, *Etika.*, hlm. 21.

bahwa perbuatan dan keputusan tersebut secara moral diperintahkan dan dilarang, Oleh karena itu penelitian etika selalu menempatkan tekanan khusus terhadap definisi konsep-konsep etika, justifikasi, dan penelitian terhadap keputusan moral, sekaligus membedakan antara perbuatan atau keputusan yang baik dan buruk.²⁸

1. Etika Sebagai Landasan Profesional

Sebagai cabang ilmu filsafat, etika dimengerti sebagai filsafat moral atau filsafat mengenai tingkah laku. Etika berbeda dengan moral, moral berisi ajaran-ajaran sedangkan etika berisi alasan-alasan mengenai moralitas itu sendiri,²⁹ Menurut Hans Wenr dalam bahasa Arab etika disebut ahklak. Norma (norm) adalah standar. pola (pattern), model (type). Hal tersebut merupakan aturan atau kaedah yang di pakai sebagai tolak ukur untuk menilai sesuatu.³⁰

Etika atau akhlak dalam khazanah Islam dipahami sebagai ilmu yang menjelaskan baik dan buruk. menerangkan apa yang seharusnya di lakukan kepada orang lain, menyatukan tujuan apa yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat.³¹ Dengan demikian Persoalan-persoalan etika adalah persoalan kehidupan manusia, Tidak bertingkah laku semata-mata menurut

²⁸ Daryl Koehn, *Landasan Etika Profesi*, alih bahasa Agus M Hardjana, cet. ke-4, (Jakarta : Kanisius, 2002), hlm. 27-71.

²⁹ Majid fakhry, *Etika Dalam Islam*, alih bahasa Zakiyuddin Baidawi, cet. ke-1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), hlm. xv.

³⁰ Namun demikian adapula yang memandang etika dan moral mempunyai makna yang sama, karena yang membedakan adalah bahasa. Dan etika berasal dari bahasa yunani yaitu ethos yang mempunyai pengertian adat istiadat,kebiasan sikap,cara berfikir,dll. Sebaliknya moral dari bahasa latin yang berarti kebiasaan,adat. Lihat K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 4-6.

³¹ Dikutip oleh Suparman, *Etika Religius Abu Hasan Al-mawardi*, (Yogyakarta: IAIN Sunan kalijaga, 2001), hlm. 33.





naluri atau dorongan hati.

Sedangkan K. Bertens mengungkapkan bahwa moral itu adaiah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok tingkah hakimya, Sedangkan profesi menurut K, Bertens menyatakan bahwa profesi adalah suatu moral community (masyarakat moral) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai,³² Dari paparan diatas dapat dipahami bahwa dalam kata moral terdapat dua makna. Pertama, sebagian cara seseorang atau kelompok untuk bertingkah laku dengan orang lain. Kedua. adanya nonna-nonna atau mlai-nilai yang menjadi dasar bagi cara bertingkah laku, Dalam fiisafat ilmu, epistemologi moral dipelajari dengan dua cara yaitu telaah metodologik dan telaah metafisik.

Telaah metodologi bersifat induktif. menggunakan logika model koherensi. Salah satu yang menonjol adalah telaah *equilibrium reflektif*. Proses penyusunan teori moral ini dimulai dari penetapan moral yang dipilih dilanjutkan dengan pemilihan prinsip-prinsip yang hendak digunakan. Lalu diuji pada moral sentralnya; diketemukan konflik dengan moral sentralnya atau tidak; bila ada konflik, diadakan revisi. Itu prosedur menurut Goodman (1965).

Sedangkan Rewals (1971) menyarankan imrak melihat koherensi dengan moral yang lebih jauh, misalnya keyakinannya atau teori yang dianut.³³

Cara telaah yang kedua adalah telaah metafisik, Cara ini digunakan oleh realisme metafisik, Dengan pandangan meta-ideologi, moral adalah

³² Ahmad Amin, *Etika*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1991), hlm. 3.

³³ K. ertens., hlm. 33



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

fakta konstruktif. Kemauan Hakim untuk membantu pihak adalah fakta konstruktif. Fakta konstruktif tersebut bukan iemuan pada obyek seperti fakta-fakta penelitian pada umumnya, melainkan fakta konsrrak pandangan human.³⁴ Pandangan human tersebut dapat dilihat dari pandangan sosialogis. psikologis dan keyakinan agama.

Dari sisi cakupannya etika dapat dibagi dua yaitu, etika umum dan etika terapan. Etika umum merupakan ilmu atau filsafat moral yakni teoritis yang mencakup seluruh aktivitas kehidupan. Sedangkan etika khusus adalah etika individual atau sosial atau lingkungan hidun, Pada wilayah inilah etika pofesi berada.³⁵

Menurut Majid Fakhri. sistera etika Islam dalam dikelompokkan dengan empat tipe: pertama, moral skriptualis. Kedua, etika teologis, Ketiga, teori-teori filsafat. Keempat, etika religius. Dari keempat tipologi di atas etika religius akan menjadi pilihan sebagai landasan teori dalam penelitian ini.

Dengan kerangka demikian dapat dikatakan bahwa etika profesi merupakan tuntutan dasar hakim dalam Islam. Dan juga atas teori tersebut dapat diasumsikan bahwa etika profesi hakim merupakan pengejawantahan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, keadilan dan pertanggung jawaban dalam realitas penegakan hukum oleh hakim. Ada tiga komponen yang menopang tegaknya kukum dan keadilan di tengah masyarakat, yaitu adanya aparat penegak hukum yang professional dan memiliki integritas moral yang terpuji,

³⁴ Noeng Muhadjir, "Postpositifisme Realisme Metafisik" dalam M. Amin Abdullah, dkk (Ed.), *Antologi Studi Islam, Teori & Metodolog*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), hlm. 166.

³⁵ Noeng Muhadjir, *Filsafat ilmu, Positifisme, Postpositifisme, dan Postmodernisme, Edisi II*,

adanya peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan adanya kesadaran masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum.³⁶

Dalam penegakan hukum, menurut O. Notohamidjojo, ada empat norma yang penting dalam penegakan hukum yaitu kemanusiaan artinya sebagai manusia jadikanlah manusia. Kedua. keadilan yaitu memberikan sesuatu sesuai haknya. Ketiga kepatutan yaitu pemberlakuan hukum harus melihat unsur kepatutan (equity) dalam masyarakat. Keempat, kejujuran yaitu seorang hakim dalam menegakkan hukum harus benar-benar bersikap jujur untuk mencari hukum dan kebenaran.³⁷

2. Eksistensi Hakim Sebagai Penegak Hukum Dalam Islam

Hakim mempunyai tugas sangat penting. Disamping itu hakim harus mempunyai moral yang tinggi, berbudi luhur, dan menegakan hukum secara benar dan adil, Sehingga peranan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan dapat dilihat dari tugasnya:

1. Penggali Hukum³⁸

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

2. Pemutus Perkara

(Yogyakarta: Rakesarasin, 2001), hlm. 138.

³⁶ Ibid

³⁷ Menurut K. Bertens, Etika., hlm.6.

³⁸ Imam Abi Husain Muslim Bin al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qusyairi Annisaburi, *Kitab Jami' I Asahih, Bab Bayanu Ajrul Hakim Iza ajtahidu fa asoba au akhtou*, (Bairut : Dar al-Fikr, tt), juz 5, hlm.131.



إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ لَتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ

لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat”. (Q.S. An-Nissa: 105)

3. Pemberi Nasehat

وَأَتُوا آلَ يَتَمَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ

إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٥٢﴾

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu Makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar”. (Q.S. An-Nissa: 52)

Sementara dalam kaidah ushul Fiqh sendiri hakim sebagai pemegang amanah harus dapat membawa kemaslahatan.³⁹ Sebagai salah satu bentuknya adalah dengan adanya kode etik profesi hakim yang tujuannya luituk Kemaslahatan bagi manusia, Kemaslahatan tersebut tercantum dalam azas-azas yang dituangkan dalam syariat hukum Darury yaitu hal yang pokok dalam kehidupan manusia, hukum Hajjiy yaitu hukum yang menselaraskan dengan hajat dan kebutuhan manusia, dan hukum Tahsiny yaitu merupakan keindahan hidup yang merupakam pelengkap dalam kehidupan manusia.⁴⁰ Dengan demikian tujuan penegakkan keadilan dan kebenaran dapat tercapai, dan kode

³⁹ Muhtar Yahya dan Faturrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, cet. ke-1, (Bandung: Ma'arif), hlm. 527.

⁴⁰ Dahlan Idhamy, *Karakteristik Hukum Islam*, cet. ke-1, (Surabaya: al-Ikhlash, 1994), hlm. 20.



etik profesi hakim benar-benar membawa masiahat bagi manusia.

G. Mefode Penelitian

1. Bentuk dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang diiakukan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber kepustakaan berupa data-data primer dan sumber data sekunder yang reieven dengan pembahasan ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik metode yang menggunakan pencarian fakta dan data-data yang ada dalam kode kehormatan hakim dan kemudian dianalisa densan kerangka pemikiran yang telah disusun dengan cermat dan terarah,

3. Pengumpulan Data.

Bentuk penelitian ini adalah berupa kajian pustaka (*library research*). Kajian pustaka berusaha mengungkapkan tentang kode etik hakim di Indonesia. Adapun data primernya adalah: kode etik profesi hakim dan UU No 4 TAhun 2004 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, sedangkan sumber sekundenya adalah: buku-buku dan tulisan para ahli hukum yang membahas masalah ini. Adapun yang menjadi bahara tersier adalah semua bahan yang menunjang bahan primer dan sekunder seperti kamus hukum, eksiklopedia dan lain sebagainya.



4. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Filosofis-Normatif. Secara filosofis yaitu dengan melakukan penganalisaan makna-makna secara filosofis terhadap kode etik profesi hakim secara umum, sedangkan secara normatif yaitu melakukan analisa terhadap suatu fenomena yang berdasarkan aturan hukum Islam (normatif), Analisa dilakukan dengan metode content analysis (analisa isi)

H. Sistematika Pembahasan,

Agar lebih mudah pembahasan dan pemahaman materi tesis ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan dalam beberapa bab dan dari beberapa dirinci menjadi beberapa sub bab.

BAB I : PENDAHULUAN, yang terdiri dari; Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Langkah-langkah Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II: KODE ETIK PROFESI HAKIM INDONESIA, terdiri dari; Gambaran Umum Peranan Hakim: Pengertian, Dasar dan Syarat Pengangkatan Hakim dan Kode Etik Profesi Hakim Indonesia: Pengertian Kode Etik, Rincian Kode Etik Profesi Hakim, dan Nilai-nilai dalam Kode Etik Profesi Hakim.

BAB III : KODE ETIK PROFESI HAKIM DALAM ISLAM, terdiri dari; Pengertian Etika Islam, Landasan Etika Profesi dalam Islam, Sistem Etika Islam dalam Penegakan hukum.



BAB IV : HUKUM ISLAM DAN KODE ETIK PROFESI HAKIM

INDONESIA, terdiri dari; Etika Pertanggungjawaban Hakim Terhadap Amal Manusia, Aplikasi Kode Etik Profesi Hakim Indonesia: Dalam Persidangan, Hubungan sesama Hakim atau Pegawai, dan Tanggung Jawab Sosial hakim Terhadap Hukum.

BAB V : PENUTUP, yang terdiri dari; Kesimpulan dan Saran-Saran.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

DAPSTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin, "Kajian Ilmu Kalam di IAIN Menyongsong Perguliran Paradigma Keilmuan Keislaman pada Era Milenium Ketiga", Jurnal *Al-Jamiah*, No. 60/VI/2000.
- , *Filsafat Etika Islam*, alih bahasa Hamzah, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 2002.
- Abdurrahman, dan Soejono, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-3, Jakarta: Rineka Cipta, , 2003.
- Adji, Oemar Seno, *Etika Profesional dan Hukum: Profesi Advokat*, cet. ke-1, Jakarta: Erlangga, 1991.
- Ali, A. Mukti, *Etika Agama Islam dalam Pembentukan Kepribadian Nasional dalam Pemberantasan Kemaksiatan dari Segi Agama Islam*, Yogyakarta: Nida, 1991.
- A'la., Abd, *Melampaui Diaolog Agama*, Qamaruddin SF, (ed.), cet. ke-1, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2002.
- Al-Asqolani, Al-Hafizh Bin Hajar *Buluqul Maram*, Semarang: Toha Putra, ttp
- Amin, Ahmad, *Etika (Ilmu Ahlak)*, alih bahasa Farid Ma'ruf, cet. ke-8, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Amril M., "Studi Pemikiran Filsafat Moral Raghil Al-Isfahani (w.± 1108 M)," disertasi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.
- Ar-ruhaily, Ruway 'I, *Fiqih Umar II*, Jakarta: Daar-AlGharbi Al Islami, Beirut.
- Arif, Mahmud, "Konsep Pendidikan Moral al-Mawardi," laporan penelitian, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.
- Arifin, Bustanul, *Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Asy'ari, Musa, *Manusia Pembentuk Kebudayaan Dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: LESFI, 1992.
- Azizy, Qodri, *Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sesuai Saintifik-Modern*, cet. ke-1 Jakart: Teraju, 2003.
- A. Mustofa, *Akhlaq Tasauf*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 1997.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- Arto, H.A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Azizy, A. Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Umum*, cet. ke-1, Yogyakarta: Gama Media, 2003.
- Bakri, Asafri Jaya *Konsep Syari'ah Menurut Syatibi*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Islam Dalam Tatahan Masyarakat Indonesia*, Bandung: Rosda Karya, 1997.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, *Analisis Evaluasi Tentang Kode Etik Advokat dan Konsultan Hukum*, Jakarta: 1997.
- Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, Jakarta : Gramedia 1996.
- CT. Onions (ed) *The Shorter Oxford English Dictionary* London : Clarendon Press Oxford, 1944.
- Djamil, Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Engineer, Asghar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihantoro, cet. ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Fakhry, Majid, *Etika Dalam Islam*, alih bahasa Zakiyuddin Baidhawi, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Fauroni, R. Lukman, "Etika Bisnis dalam Al-Qur'an," tesis IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.
- Fauroni, R. Lukman, dan Muhammad, *Visi al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, cet. ke-1, Jakarta : Salemba Diniyah, 2002.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987.
- Huda, Miftahul, "Dimensi Etis Pesan-pesan al-Quran: Sebuah Telaah Filsafat," tesis IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1996.
- Harahap, M.Yahya, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Kartini : 1993.
- Hanafi , Ahmad., *Pengantar Theologi Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1992.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hadi, Hardono, *Jati Diri Manusia Berdasarkan Filsafat Organisasi Whitehead*, Yogyakarta : Kanisius, 1966.

Izutsu, Toshihiko, *Konsep-konsep Etika Religius dalam Qur'an*, alih bahasa Agus Fahri Husein dkk, cet. ke-1, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993.

-----, *Etika Beragama Dalam Islam*, cet. ke-1 Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

Idhamy, Dahlan, *Karakteristik Hukum Islam*, cet. ke-1, Surabaya: al-Ikhlas, 1994.

Kedaulatan Rakyat, *Konsistensi Arah Penegakkan Hukum Di Indonesia*, Rabu 17 Desember 2003.

Kompas, *Etika Profesi Kunci Pas Penegakkan Hukum*, 29 Mei 2002.

K. Bertens, *Etika*, cet. ke-2 Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994

Kuhn, Daryl, *Landasan Etika Profesi*, alih bahasa Agus M. Hardjana, cet. ke-4, Yogyakarta : Kanisius 2002.

Lubis, Suhrowardi K., *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-2, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990.

Mardjono, Hartono, *Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesiaan: Proses Penerapan Nilai-nilai Islam dalam Aspek Hukum, Politik, dan Lembaga Negara*, cet. ke-1 Bandung: Mizan, 1997.

Mukti, Takbir Ali, dkk, *Membangun Moralitas Bangsa*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian Dan Pengamalan Islam Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 1998.

Muqoddas, Busyro, “*Etika Profesi: Fungsi dan Prospek*”, makalah Karya Latihan Hukum (Kartikum) XV yang diselenggarakan oleh Laboratorium Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1997.

Mawardi, Imam, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, Tahun 2000.

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.

-----, *Etika Profesi Hukum*, cet. ke-1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.



Muhadjir, Noeng, "Postpositifisme Realisme Metafisik" dalam M. Amin Abdullah, dkk (Ed.), *Antologi Studi Islam, Teori & Metodolog*, cet. ke-1, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000.

M. Wahyudi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebebasan hakim : Study analisis pasal 1 ayat (1) dan pasal 14 ayat (1) UU. Nomor 35 tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman, Skripsi tidak di terbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan kalijaga, 2000.

Mulano, Martias gelar Imam Radjo, *Pembahasan Hukum: Penjelasan Istilah-istilah Hukum Belanda-Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Muslehuddin, Muhammad, , *Filsaafat Hukum Islam dan pemikiran orientalis Studi Perbandingan*, (penerj.) Yudian Wahyudi Amin, cet. ke-3, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.

Musrifah, Atiyah *al-Qada fi al-Islam*, Ttp : Syarkat al-Ausaq, 1996.

Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam, dan Pemikiran Orientalis, Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, alih bahasa Yudian Wahyudi Asmin, Yogyakarta: Tiara Wacana: 1991.

Madkur, Muhammad Salam, *Al-Qada Fil Islam*, Ttp : tt.

Nurdin , Muslim, *Moral Dan Kognisi Islam*, cet. ke-1, Bandung : Alfa Beta, 1993.

Nasir, Salihun A, *Tinjauan Akhlak*, cet. ke-1, Surabaya : al-Ikhlash, 1991.

Naisaburi, Imam Abi al-Husaini Muslim Bin al-Hujaj Ibn Muslim al-Qusairy an-, *al-Jami' as-Shahih*, Bairut: Dar al-Fikr, tt.

....., *Sahih Muslim*, Ttp.: al-Qana'ah, t.t.

Praja, S Juhaya, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung : Universitas Islam Bandung, 1995

Quasem, M. Abdul, *Etika Al-Ghazali Etika Majemuk Di Dalam Islam*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka, 1988.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. ke-27, Bandung : Sinar Baru, 1994.

Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi Ash-, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, cet. ke-1, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- Sajsatani, Abi Dawud Sulaiman bin al-'asy'as as-, *Sunan Abi Dawud*, Bairut: Dar al-Fikr, 1414/1994.
- Rafiqoh, "Etika Menurut Fazlur Rahman," skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.
- Rasjidi, Lili, dkk, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, Cet. ke-9, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004.
- Rodlin, Muhammad, *Etika Profesi: Telaah Pendekatan Filsafat Moral*, skripsi tidak di terbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998
- Ritonga, A.Rahman, dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Sidiktono, dkk, *Ibadah dan Akhlak Dalam Islam*, (ed.) Ainur Rahim Faqih dan Amir Muallim, cet. ke-1, Yogyakarta : UII Press, 1998
- Siregar, Bismar, *Hukum Hakim Dan Keadilan Tuhan*, cet. ke-1 Jakarta: Gema Insani Press, 1995
- Setiardja, A. Gunawan, *Dialektika Hukum Dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Salam, Burhanuddin, *Etika Sosial, Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*, Cet. ke-1, Jakarta: Aneka Rineka Cipta, 1997.
- Shidarta, dan Darji Darmodiharjo dan *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, cet. ke-4, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Suparman, *Etika Religius Abu Hasan Al-mawardi*, (364 atau 974-450 atau 1058 kajian kitab *Adab wa addin*, Disertasi doctor tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan kalijaga, 2001
- Standar Disiplin Profesi Hukum, <http://www.hukumonline.com>, akses 8 Desember 2003.
- Said, H. Muh., *Etika Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Pradya Paramita, 1980.
- Sumaryono, E., *Etika Profesi: Norma-norma Bagi Penegak Hukum*, cet. ke-1, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Syarifuddin, Amir, (ed.) Abdul Halim, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, cet. ke-1, Jakarta: Ciputat Press, 2002.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Suseno, Frans Magnis dkk. (peny.), *Etika Sosial*, Jakarta: APTIK-Gramedia, 1989.

....., *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Syukur, Syarifuddin, *Aspek Etika Dalam Islam, Suatu Kajian Terhadap Pemikiran Etika Muhammad Iqbal*," tesis IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1993.

Utomo, Priyo, *Etika Dan Profesi*, Jakarta: Gramedia, cet. ke-1, 1992.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 *Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman beserta penjelasannya*, Bandung: Karina, 2004.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *Tentang Peradilan Agama*.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *Tentang Tata Usaha Negara*.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 *Tentang Peradilan Militer*.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 *Tentang Peradilan Hak Azasi Manusia*.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 *Tentang Mahkamah Agung beserta penjelasannya*. Bandung: Karina, 2004.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 *Tentang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya*.

Wisnubroto, Aloysius, *Hakim Dan Peradilan Di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, cet. ke-1, 1997.

Yahya, Muhtar, dan Faturrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, cet. ke-1, Bandung: Ma'arif .

Zakiah, Wasingatu, dkk, *Menyikap Tabir Mafia Peradilan*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, cet. ke-1, 2002.